

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAPOYA KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

INGGRID K. ROMPIS

FLORENCE D.J LENGKONG

GUSTAF. B. TAMPI

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kapoya. Aspek yang dianalisis yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Desain penelitian kualitatif. Temuan penelitian bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari kondisi lingkungan yang berhasil, dari hubungan antar organisasi, telah berjalan dengan baik, dari sumber daya organisasi sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaksana/kader yang bertanggungjawab sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari kemampuan dan karakteristik agen pelaksana sudah dikatakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Program, Kampung Keluarga Berencana Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara berkembang diantara beberapa negara-negara berkembang yang terdapat di dunia. Disetiap negara berkembang hal yang mendasar ditemui merupakan jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia sendiri ialah negara yang terdapat di dunia dengan total penduduk yang beragam. Perkembangan penduduk jadi salah satu permasalahan yang di hadapi di Indonesia dikarenakan penambahan penduduk di tiap tahunnya, hingga perkembangan penduduk ini jadi pengaruh terhadap aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan hidup serta kesejahteraan keluarga supaya jadi warga yang lebih baik. Pengaruh perkembangan penduduk ini menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan, pengangguran dimana-mana, serta kekurangan bahan pangan. Jumlah penduduk yang besar pasti bukan perkara yang gampang dalam mengatasinya. Dibutuhkan usaha serta upaya dalam menurunkan laju perkembangan penduduk di Indonesia. Upaya yang bisa dicoba ialah dengan kebijakan-kebijakan yang

disusun serta dikerjakan oleh pemerintah perihal tentang menanggulangi permasalahan perkembangan penduduk yang ada di Indonesia.

Permasalahan pertumbuhan penduduk ini berdampak terjadinya kemiskinan di suatu negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Kemiskinan yaitu keadaan dimana ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Pertumbuhan kemiskinan di Indonesia pada bulan September tahun 2020 naik hingga 10,19 persen. Total masyarakat miskin pada bulan September sebesar 27,55 juta orang. Jumlah orang miskin di perkotaan meningkat sebesar 876,5 ribu disisi lain di perdesaan meningkat sebesar 249,1 ribu orang pada bulan september menurut Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2021. Sesuai pernyataan Andika dan Hastarini (2011), kemiskinan yakni isu kesenjangan yang kompleks yang disebabkan bermacam faktor yang ada kaitannya yakni mencakup tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses

terhadap barang serta jasa, lokasi, geografi, jenis kelamin serta status lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pemerintahan Indonesia dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari mensejahterakan masyarakat supaya penduduk Indonesia bebas dari kemiskinan serta terwujudnya warga yang mandiri serta bisa penuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga jadi masyarakat yang sejahtera.

Keluarga Berencana (KB) yakni program skala nasional guna menurunkan fertilitas serta mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Dari program ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan pada masyarakat, adapun untuk mensejahterakan ekonomi Indonesia dan menstabilkan kepadatan penduduk. Keluarga Berencana (KB) program yang dikelola pada UU NO. 10 Tahun 1992 yang dikerjakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jalannya program ini yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk meminimalisir ataupun untuk menunda kehamilan yang diantaranya pemakaian kondom, pil KB, implan, KB suntik, *Intra Uterine Device* (IUD), vasektomi, tubektomi.

Kampung Keluarga Berencana (KB) yakni kesatuan masyarakat di tingkat desa dengan persyaratan tertentu dengan integrasi program KKBPK serta pengembangan sektor terkait guna menunjang kualitas hidup keluarga setempat. Pembentuka Kampung KB berdasarkan UU No 52 Tahun 2009 terkait Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesi No 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 terkait Perencanaan serta Pembentukan Kampung KB. Dan Tanggal 12 Januari Surat Kepala BKKBN Pusat No.046/BL/200/B4/2016 terkait Pembentukan Kampung KB diseluruh Indonesi. Kampung Keluarga Berencana ini diumumkan langsung oleh Presiden Republik

Indonesia Ir. Joko Widodo di 14 januari 2016 di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Lewat program ini maka pemerintah telah menghasilkan dari berbagai penjurur Indonesia dengan menjalankan program Kampung KB ini. Salah satu cara pemerintah guna mencegah permasalahan seperti isu kependudukan di Indonesia yang wilayah-wilayahnya jarang terekspos oleh pemerintahnya sendiri yaitu dengan membentuk program ini. Program Kampung KB ini dapat dijalankan dengan begitu baik apabila masyarakat di dalamnya ikut berpartisipasi pada seluruh program ini. Berikut merupakan kriteria yang menentukan suatu wilayah dapat dijadikan sebagai lokasi Kampung KB yaitu : Kumuh, Daerah aliran sungai, Pesisir, Bantaran kereta api, Kawasan miskin, Daerah terpencil, Kawasan industry, Perbatasan, Kawasan wisata dan Tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Program Kampung KB berperan untuk mengurangi pertumbuhan pada masyarakat dan juga penggunaan pemasangan alat kontrasepsi, tapi tidak hanya itu juga melainkan program Kampung KB dapat juga menjadikan tempat atau wadah bagi masyarakat yang ada untuk mengupayakan kesadaran masyarakat dalam mengubah pola pikir serta tindakan yang lebih baik. Terdapatnya program Kampung KB ini maka harapannya pemerintah Indonesia dapat melihat setiap daerahnya dengan program ini. Pada program Kampung KB ada beberapa aktivitas di dalamnya. Untuk kegiatan tersebut mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pelayanan KB.

Salah satu kampung KB di Sulawesi Utara adalah Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Kapoya diresmikan guna menjadi lokasi Kampung KB oleh Bupati Minahasa Selatan

Christiany Eugenia Paruntu, SE pada tanggal 12 Agustus 2017. Setelah berjalannya program Kampung KB di Desa Kapoya kurang lebih 4 tahun belum sepenuhnya terlihat perubahan yang signifikan dari berjalannya program ini. Program Kampung KB yang dijalani di Desa Kapoya terdapat beberapa masalah dalam menjalankannya yaitu, dengan adanya pergantian pemimpin desa ada beberapa kegiatan yang sudah tidak terlaksanakan dengan baik. Ada pun masalah dalam komunikasi dari para pelaksana dan juga masyarakat mengenai sosialisasi pun menjadi kendala yaitu kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang dijalankan dikarenakan wabah Covid-19 sehingga sosialisasi kepada masyarakat jadi terganggu. Dan terakhir kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti program kelompok kegiatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kogoya, Ogotan dan Londa (2020) menerangkan bahwasanya komunikasi dalam hal implementasi program perlu menjadi perhatian yang penting. Rampengan, Lengkong dan Rares (2019) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan sangat berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi serta kerangka birokrasi. Dua penelitian terdahulu diatas setidaknya memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan dalam kajian ilmu administrasi publik.

Implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaku pelaksana atau penerapan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengarah pada perilaku guna menggapai tujuan- yang sudah ditentukan pada suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan guna mengubah keputusan ini menjadi model operasional serta berusaha menggapai perubahan-perubahan besar atau kecil yang mana sudah ditetapkan. Horn (Tahir, 2014: 55) merujuk implementasi selaku aktivitas yang dilaksanakan oleh

individu/birokrasi, kelompok pemerintah atau swasta guna menggapai tujuan yang dinyatakan dalam suatu kebijakan”.

Salusu (Tahir, 2014:55-56) menerangkan bahwasanya, “implementasi selaku operasionalisasi dari bermacam aktivitas guna menggapai suatu sasaran tertentu serta seluruh elemen manajemen mulai dari manajemen puncak hingga karyawan terbawah”.

Sesuai pernyataan Anderson (Mulyadi,2016:165) kebijakan publik yakni kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah serta pejabat pemerintah. Disisi lain, sesuai pernyataan Carl Friedrich, kebijakan publik yakni seperangkat aktivitas yang dinyatakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu, serta hambatan yang mana peluang yang dinyatakan guna berfungsi dalam meminimalisir kebijakan guna menggapai tujuan yang diinginkan (Leo Augustino, 2006: 7).

Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan berfokus pada aktivitas yang diambil oleh pemerintah atau individu (atau kelompok) guna menggapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Kemudian, menurut Tachan (Tahir, 2014:53), “Implementasi kebijakan publik bisa dipahami selaku salah satu kegiatan administratif selaku institusi (sistem birokrasi) dalam tahapan kebijakan publik serta bisa dipahami juga selaku studi lapangan administrasi publik yang diimplementasikan dengan ilmu”. Sesuai pernyataan Mazmanian dan Sebatier (Wahab, 2012:135). Implementasi yakni pemahaman terkait apa yang sebenarnya dialami setelah suatu program dikatakan sah atau formal serta menjadi fokus penegakan kebijakan yang mana aktivitas yang muncul setelah disahkan pedoman tersebut menyebabkan hasil/dampak nyata pada komunitas

Sesuai pernyataan Wibawa (Tahir, 2014:58) tujuan implementasi kebijakan yakni

guna menentukan arah supaya tujuan kebijakan publik bisa diwujudkan selaku hasil dari kegiatan pemerintah. Seluruh proses pembuatan kebijakan hanya dapat dimulai setelah tujuan dsertasarasan umum awal ditetapkan, program telah dikembangkan, serta sejumlah uang telah dialokasikan guna menggapai tujuan serta sasaran tersebut.

Program Kampung Keluarga Berencana atau populer dengan sebutan program Kampung KB yakni kesatuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang mempunyai persyaratan tertentu, yang mana ada keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pembangunan sektor mengenai apa yang dilaksanakan secara sistemik serta sistematis. Kampung KB yakni salah satu model implementasi penuh program KKBPK serta selaku program strategis yang ditujukan guna akselerasi agenda pembangunan utamanya di wilayah pinggiran kota. Kampung KB diwujudkan selaku berkomitmen guna memperkuat program KKBPK yang dimanajemen serta diadakan oleh masyarakat, sendiri, serta guna memberdayakan pelayanan KB yang komprehensif kepada masyarakat guna membentuk keluarga yang bermutu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana tiap data yang dihasilkan berupa fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan akan dianalisis dan dideskripsikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kualitatif ini yakni guna mendeskripsikan secara rinci fakta-fakta di balik fenomena tersebut.. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti mendeskripsikan setiap kejadian atau fenomena yang ada di lapangan, serta setiap hasil yang akan diperoleh dari orang-orang atau narasumber yang berkaitan penting dengan program kampung KB di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran

Kabupaten Minahasa Selatan. Fokus dalam penelitian ini yakni program kampung KB. Sesuai rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini dengan memakai model implementasi kebijakan publik sesuai pernyataan G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinellii (Subarsono (2005)ada empat faktor yang menentukan berhasilnya implementasi suatu kebijakan, yakni Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumber daya organisasi dan Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat, melakukan pengamatan dan memngumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kapoya merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Suluun Tareran tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Penduduk yang ada di Desa Kapoya sebesar 685 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 353 jiwa dan jumlah perempuan 332 jiwa. Masyarakat Desa Kapoya dalam tingkat pendidikan banyak yang tamatan SMA (Sekolah Dasar Menengah) yaitu dengan jumlah 242 orang, dan disusul dengan tamatan SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah 195 orang. Sedangkan untuk SMP (Sekolah Mengengah Pertama) dengan jumlah 134 Orang Sedangkan untuk Sarjana (S1,S2,S3) yaitu 69 orang. Ada juga yang masih mengikuti Paud/TK dengan jumlah 24 orang dan yang belum bersekolah 21 orang.

Adapun struktur organisasi pengelola Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya penanggung jawab di Desa Kapoya yaitu Camat suluun Tareran. Pelindung dari Program ini yaitu uokum tua. Ketua diduduki oleh Ibu Sani Muaya, Bapak Alfin sangeroki selaku sekretaris program ini,

Bendahara oleh Ibu Merke Lopian. Adapun seksi keagamaan oleh Pdt. Femmy Mawikere Lasut, M.Th, seksi sosialisasi/pendidikan oleh Ibu Fintje Muaya, untuk seksi reproduksi oleh Ibu Naomi Legi, seksi perlindungan oleh Ibu Emmi Mintalangi, seksi kasih sayang oleh Ibu Desye Laoh, juga seksi social budaya oleh Ibu polin Rumondor, dan yang terakhir seksi pembinaan lingkungan oleh Ibu Reflin Ruindungan.

Dalam kaitannya dengan implementasi program Kampung KB dalam upaya kesejahteraan masyarakat di Desa Kapoya terlihat bahwa faktor kondisi lingkungan mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi public adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan.

Salah satu instrument lingkungan social adalah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya didukung oleh masyarakat setempat di mana sebagian dari masyarakat mengikuti atau berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Hal ini dikarenakan Program Kampung keluarga Berencana untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Tetapi akan hal itu terdapat juga masalah dari sebagian masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi terhadap Program Kampung Keluarga Berencana ini. Beberapa masyarakat masih kurang peduli akan pentingnya program ini bagi kehidupan sehari-hari.

Adapun dari lingkungan politik adalah instansi pemerintah yang ada di Desa Kapoya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kapoya mengenai Program Kampung Keluarga Berencana, dapat dilihat bahwa telah terwujud kondisi lingkungan yang baik sehingga mendukung jalannya program ini. Pemerintah di Desa Kapoya dalam hal ini selalu mengontrol akan

jalannya program dan memfasilitasi semua kegiatan yang dilaksanakan. Ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut mendorong keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya.

Hubungan antar organisasi ini sangat mempengaruhi tercapainya suatu kebijakan. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik, maka pelaksanaan program tidak bisa dikatakan berhasil. Hubungan baik tercipta melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi agar program-programnya dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Komunikasi dalam hal pelaksanaan program sudah dimulai ketika adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana ketika program berjalan. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri masih terdapat masalah dalam hal sosialisasi, hal tersebut dikarenakan dengan adanya wabah Covid-19 maka sosialisasi pun sulit dilakukan dalam mengumpulkan masyarakat tetapi dalam beberapa waktu sosialisasi dapat dilakukan dengan adanya batasan-batasan untuk pengumpulan masyarakat.

Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting guna menunjang keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya menunjukkan kepada seberapa besar dukungan sumber daya manusia melaksanakan program atau kebijakan. Berjalannya suatu proses penerapan suatu kebijakan harus didampingi dengan pengontrolan yang baik terhadap sumber daya yang dimiliki oleh suatu

organisasi sehingga jalannya suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dikatakan sudah memadai yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab yang bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB. Kemudian terdapat penasehat yang membrikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung KB. Dan juga para pelaksana di setiap seksi-seksi program ini. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya sudah memadai. Diluar dari sumber daya manusia demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan persoalan menyangkut waktu yang mana para pekerja tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana berperan penting dalam pelaksanaan program. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana sangat berhubungan dengan bagaimana suatu program dapat terorganisir dengan baik. Dapat dilihat dari karakteristik dari para pelaksana. Dapat dilihat dari para pelaksana yang setiap bulannya dilakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaksana agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya para pelaksana dapat mempertanggung jawabkan dengan kemampuan mereka. Namun dalam hal ini masih juga terdapat masalah yang dihadapi yaitu dari para pelaksana itu sendiri. Terdapat beberapa pelaksana yang kurang aktif dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh KKBPK (Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang dilakukan setiap sebulan sekali. Sehingga hal tersebut dapat terganggu dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana ini dikarenakan mereka kurang paham akan tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan akhir tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari kondisi lingkungan yang ada, pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dapat dikatakan berhasil karena dukungangan dari pemerintah dan masyarakat Desa Kapoya. Meskipun dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun tetap ada kendala yang harus dihadapi, yaitu sebagian masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya ini. Dilihat dari hubungan antar organisasi, pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, hubungan antar para pelaksana dan pemerintah yang dapat berkomunikasi dengan baik begitupun juga pelaksana yang melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, walaupun masih terdapat kendala yang ada, yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terhambat dengan adanya pandemic Covid-19 ini sehingga membuat pelaksanaan Program Kampung Keluarga terhambat. Dilihat dari sumber daya organisasi, untuk pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Kapoya yang dilakukan oleh para pelaksana/kader yang bertanggungjawab sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan program, ini terdapat juga kendala dalam hal ini yaitu waktu. Dikarenakan para pelaksana/kader yang tidak

konsisten dalam melaksanakan tugas dengan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dilihat dari kemampuan dan karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana dari para pelaksana sudah dikatakan berjalan dengan baik, karena para pelaksana/kader dilakukan pembinaan satu bulan sekali hal itu untuk meningkatkan kualitas dari para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Namun dalam hal ini terdapat juga masalah, yaitu terdapat beberapa pelaksana yang kurang aktif dalam mengikuti pembinaan guna meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana mereka kurang paham akan tugas dan tanggungjawabnya.

Setelah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan maka peneliti memberikan saran berkaitan dengan kondisi lingkungan yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap program Kampung Keluarga Berencana ini, sebaiknya para pihak yang terkait untuk dapat merangkul masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi. Berkaitan dengan hubungan antar organisasi terdapat masalah mengenai kegiatan sosialisasi dikarenakan Pandemi Covid-19 maka dalam hal ini pihak terkait dapat melakukan sosialisasi dengan cara mempublikasikan di social media mengenai program ini agar masyarakat tetap mengetahui pentingnya program ini. Berkaitan dengan sumber daya yaitu masih terdapat masalah dalam sumber daya waktu dimana para pelaksana/kader tidak konsisten dalam melakukan tugas mereka, jadi sebaiknya pihak terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap para kader/pelaksana yang tidak tepat waktu dalam melakukan tugas dan tanggungjawab mereka

dengan memberikan teguran maupun sanksi apabila mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Berkaitan dengan kemampuan dan karakteristik agen pelaksana juga masih terdapat masalah yaitu beberapa pelaksana yang kurang aktif dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan ini maka pihak terkait yang bertanggung jawab atas para pelaksana/kader ini harus dapat merangkul mereka yang kurang aktif dan juga dapat memberikan sanksi kepada mereka yang kurang aktif agar para pelaksana/kader yang kurang aktif akan sadar atas pentingnya pembinaan tersebut sehingga program bisa terlaksanakan dengan baik atas kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Andika, Hastarini. 2011. "Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)". Institut Pertanian Bogor.
- Kogoya, Orina. Ogotan. M dan Londa.V.Y. 2020. Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya. Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol VI No.88, 2020.
- Mulyadi. D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Rumpengan, Juan. Lengkong. F.D.J dan Rares.J.J. 2019. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik desa di desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Jurnal Administrasi Publik Fispol
Unsrat Vol V No.74, 2019.
- Solichin. Abdul Wahab, 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik(Konsep, Teori, dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tahir. A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta